KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LAGUBOTI KABUPATEN TOBA

Nelson Manurung
NPP.29.0150
Asdaf Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: nelsonmanurung99@gmail.com

ABSTRACT

In Toba Regency, street vendors (PKL) are one of the problems, many traders carry out trading activities in public facilities, which disturb the community environment. Toba Regency is trying to deal with this through the Civil Service Police Unit with the relevant Office by enforcing Regional Regulations and providing facilities for street vendors. However, there are still many street vendors who prefer to stay in prohibited places rather than in the facilities provided by the local government. The purpose of this study was to determine and analyze the performance of Satpol PP in controlling street vendors and the inhibiting factors of Satpol PP performance in controlling street vendors in Laguboti Market, Toba Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. The technique used in collecting data is observation, interview, documentation and triangulation techniques. The data analysis technique uses 3 stages, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the performance carried out by the Toba District Civil Service Police Unit in controlling street vendors at the Laguboti Market was quite good according to the applicable rules and procedures. Internal and external factors from the Satpol PP are limitations in carrying out their functions and duties.

Keywords: *Street Vendors, Performance, Civil Service Police Unit, Control*

ABSTRAK

Di Kabupaten Toba Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu problematika, banyak pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di fasilitas umum, yang mengganggu lingkungan masyarakat. Kabupaten Toba berusaha

menangani hal tersebut melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas terkait dengan menegakkan Peraturan Daerah dan menyediakan fasilitas bagi PKL. Namun masih banyak PKL yang lebih memilih untuk tetap bertahan ditempat yang terlarang daripada di fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL serta faktor-faktor penghambat kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Laguboti Kabupaten Toba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan 3 tahap yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam penertiban PKL di Pasar Laguboti, sudah cukup baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Faktor internal dan eksternal dari Satpol PP yang menjadi keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumatera Utara khususnya wilayah Kabupaten Toba merupakan daerah otonom dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi serta memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Kabupaten Toba yang ibukotanya terletak di Kecamatan Balige termasuk ke dalam perencanaan sebagai daerah induk terkait pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba tahun 2020-2045. Oleh karena itu menjadi pedagang adalah sektor informal yang paling banyak dimasuki masyarakat di Toba. Di Kabupaten Toba yang menjadi problematika terhadap pedagang adalah kurangnya kesadaran terhadap ketertiban dan kebersihan dari pedagang di pasar. Banyak pedagang yang berjualan secara liar yang mengganggu lingkungan umum serta kenyamanan masyarakat seperti di Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti. Sebelumnya Pemerintahan Toba sudah melakukan penataan pasar di Kecamatan

tersebut dengan menyediakan dan menentukan lokasi bangunan untuk para pedagang.

Lokasi dan bangunan yang disediakan, pemanfaatannya tidak dimaksimalkan para pedagang dan tetap bandel untuk berjualan secara liar. Banyak pedagang yang menggunakan sebagian bahu jalan dan trotoar sekitar Pasar Laguboti sehingga kemacetan menjadi dampak yang sering terjadi apalagi pada hari senin. Salah satu alasan dari pedagang bahwa dengan jualan di sekitar bahu jalan dan trotoar pendapatan mereka lebih banyak dari pada di tempat bangunan yang disediakan. (*https://news.metro24jam.com*)

Banyak masyarakat lain yang mengeluh keadaan jalan yang selalu saja bermasalah karena kurang lancarnya mobilitas dari penggunaan jalan umum antar lintas kabupaten tersebut. Kemudian tenda dan ruko yang dibangun kurang tertata rapi dan terlihat semrawut yang membuat sekitar jalan tersebut kurang indah dan nyaman. Berdasarkan keterangan yang didapatkan peneliti dari sumber informasi di Kantor Satpol PP Kabupaten Toba. Hal yang membuat PKL tetap berdagang di bahu jalan Pasar Laguboti karena ada dukungan berupa warga membangun tenda dan bangunan ruko kemudian disewakan kepada pedagang liar tersebut. Dalam mengatasi tersebut membongkar bangunan merupakan solusi untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan pedagang pasar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Toba sudah berusaha menegakkan Perda dengan melakukan penertiban terhadap pedagang liar yang berada di Toba. Banyak upaya penertiban dilakukan oleh Satpol PP tetapi masih banyak pedagang masih berjualan di sekitar bahu jalan. Penertiban yang dilakukan tentu terpengaruh oleh sumber daya yang tersedia.

Sumber daya pada Satpol PP merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kinerjanya dan mungkin masih banyak hambatan dan permasalahan lainnya seperti sarana dan prasarananya, anggaran dan lainya di Kabupaten Toba. Sesuai tugas dan fungsinya Satpol PP berhak menegakkan Perda maupun Perkada yang berlaku di Toba, serta menertibkan dan memberi sanksi kepada pedagang yang melanggar. Selain itu sikap dan pengambilan kebijakan yang tepat menjadi

hal yang paling penting dalam melakukan penertiban. Mampu menciptakan suasana yang sejuk dan melakukan pendekatan yang persuasi, ramah dan bersahabat yang mampu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dari pedagang dan mau melakukan instruksi serta aturan yang sudah ditetapkan. Penertiban harus terlaksana dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar terciptanya humanis dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintahan daerah maupun instansi lainnya. Koordinasi yang baik serta melengkapi segala bentuk sarana dan prasarana juga sangat penting.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang diambil dalam kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Laguboti. Pemerintah Daerah sudah menyediakan fasilitas bagi masyarakat pedagang dengan menentukan lokasi dan mendirikan Pasar, akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. PKL lebih memilih beraktivitas di bahu jalan sehingga Satpol PP tidak jarang melakukan penegakan Perda dengan menertibkan PKL untuk menempati lokasi Pasar. Kemudian dipengaruhi banyaknya pedagang pendatang yang beraktivitas di bahu jalan dan mempengaruhi PKL yang sempat menempati lokasi Pasar. Banyak dampak yang terjadi sehingga mengganggu masyarakat umum serta kurang maksimalnya mobilitas penggunaan jalan umum antar Kabupaten. Oleh sebab itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian terhadap kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Laguboti.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan aturan oleh Satpol PP dalam memberikan pelayanan dan melindungi masyarakat. Penelitian Devi Tri Liana Skripsi tahun 2018 yang mengangkat permasalahan PKL yang berada di bahu jalan pasar minggu yang menyebabkan kemacetan dan kondisi pasar yang tidak bersih. Penelitian Oksi Pratama Jurnal tahun 2019 yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pekanbaru yang mengangkat permasalahan pedagang sering melakukan pelanggaran ketertiban yang sudah disepakati bersama. Nana Setyani Skripsi tahun 2019 yang berjudul Kinerja Satpol

PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta. Dalam penelitian ini fenomena permasalahan yaitu persebaran minuman beralkohol yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat. Dan masih banyak penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi dalam melakukan penelitian ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari waktu dan tempat penelitian yang berbeda, fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisis kinerja Satpol PP Kabupaten Toba, khususnya penertiban PKL di Pasar Laguboti. Fokus dalam penelitian ini tepatnya kepada kinerja Satpol PP dan hal yang menjadi faktor penghambat kinerja Satpol PP yang berkaitan dengan GAP yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis data bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Laguboti Kabupaten Toba dan faktor-faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Toba.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mengolah data yang didapatkan dari Satpol PP maupun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang dikaitkan dengan teori dan fenomena permasalahan. Peneliti memfokuskan terhadap Kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Laguboti Kabupaten Toba.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Laguboti Kabupaten Toba

A. Produktivitas

Pelayanan yang optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dicerminkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah, kinerjanya dapat dilihat berdasarkan pencapaian target kerja dan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sudah baik. Kepemimpinan yang ada adalah persuasif dengan anggota bawahannya dan juga tegas dan bijak. Kekeluargaan tetap terjaga sehingga komunikasi di Kantor Satpol PP baik. Dari pengamatan peneliti maka menunjang pencapaian tujuan dan sukses dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Satpol PP Kabupaten Toba. Hanya saja dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi dalam melengkapi sarana dan prasarana baik di lapangan maupun di dalam Kantor Satpol PP. Sumber Daya Manusia yang tersedia di Satpol PP bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya berjumlah 25 orang yang rata-rata mereka golongan III dan II, sisanya adalah pegawai honorer. Dari data pegawai Satpol PP yaitu 163 orang pegawai mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas dalam menjalankan operasi di lapangan dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Perlengkapan Operasional Satpol PP Kabupaten Toba

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Helm	40	Pembelian
2	Handy Talky (HT)	2	Hibah dari kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat
3	Target Drone	4	Hibah dari kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat
4	Alat Komunikasi Radio HF	4	Hibah
5	Antena UHF, Stationary	1	Hibah

6	Pesawat Telephone		Hibah
7	Microphone Connector Box	3	Pembelian
8	Sangkur		Hibah
9	Helm	40	Pembelian
10	Tongkat PHH (Pentungan)	40	Pembelian
11	Rompi PHH	40	Pembelian

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toba 2020

Satpol PP kabupaten Toba selalu berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari kerja sama yang selalu terjalin baik dengan Dinas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Toba sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan.

Data Indikator Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Toba

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentasi capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah	28 Kejadian	30 Kejadian	92.86 %

B. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menjadi dasar bagi organisasi publik yang harus diwujudkan birokrat pemerintah agar dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik tentu menghasilkan harapan yang diinginkan serta mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah disusun sebelumnya. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan standar pelayanan dan mutu pelayanan. Standar pelayanan di Satpol PP kabupaten Toba dalam menertibkan PKL dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga berkoordinasi dengan OPD dan Dinas terkait dan sesuai dengan pedomannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 114 Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Mutu Pelayanan yang diberikan dalam menertibkan PKL, Satpol PP Toba lebih mengedepankan pada tindakan-tindakan administratif terlebih dahulu sebelum kepada upaya penindakan di lapangan. Kemudian kembali melakukan koordinasi terhadap instansi dan pimpinan. Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar Laguboti mengedepankan tindakan administrasi berupa surat peringatan dan menyoraki PKL sampai beberapa kali.

C. Responsivitas

Dalam penyelenggaraan penegakan Perda SATPOL PP selaku lembaga pemerintah harus memiliki aparat yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, aparat harus mampu mengetahui kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dimulai dari daya tanggap aparat memberikan kesan yang baik terhadap masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa daya tanggap aparat Satpol PP Toba terkait aduan yang disampaikan masyarakat selalu mendapatkan respon dari aparat Satpol PP. Satpol PP selalu terbuka terhadap aduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kepuasan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap kinerja Satpol PP dalam memberikan pelayanan.

D. Responsibilitas

Organisasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan harus taat terhadap regulasi atau peraturan yang berlaku, karena hal tersebut yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Satpol PP Toba dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Satpol PP selalu bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku dan memiliki sikap komitmen. Peraturan yang dibuat berlaku pada semua aparat tanpa terkecuali. Dalam menjalankan program dan menunjang kelancaran kegiatan Satpol PP Toba memiliki prosedur atau tata kerja yang tersusun dengan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan Dinas antar PD.

E. Akuntabilitas

Satpol PP Toba sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi dan menegakkan Perda serta melayani masyarakat harus dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tugas dan fungsi dari Satpol PP untuk menertibkan, tetapi juga merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki beberapa organisasi pemerintahan daerah seperti Dinas Disperindag. Dalam hal ini Satpol PP berusaha melaksanakan tanggung jawab yang menjadi tugas pokoknya sebaik mungkin.

Satpol PP Kabupaten Toba tidak pernah ragu dalam menertibkan PKL, walaupun kerap kali mendapatkan perlawanan dari masyarakat pedagang bahkan ancaman dari PKL.

Penertiban PKL di Pasar Laguboti, Satpol PP Kabupaten Toba berusaha menyesuaikan diri dengan norma atau kebiasaan orang batak. Bentuk pendekatan persuasif dan berdiskusi dengan baik kepada PKL sering dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua pihak dan kekerasan. Disamping hal tersebut bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Laguboti dan sekitarnya tetap menjadi hal yang membantu Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah. Banyak masyarakat umum yang peduli dengan situasi bahu jalan Pasar Laguboti dengan melakukan bentuk pelaporan yang sah dan mau jadi saksi bagi Satpol PP jika dibutuhkan dikemudian hari.

3.2. Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Faktor penghambat merupakan hal yang menjadi pengganggu dan penghambat Satpol PP Toba dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun faktor penghambat Satpol PP dalam menertibkan PKL baik faktor internal maupun faktor Eksternal, sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersedia masih minim dan belum profesioanal, karena anggota Satpol PP yang dilatarbelakangi pendidikan dan PNS yang ada tidak sesuai dengan kompetensinya.
2. Anggaran yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL kurang maksimal dalam penegakan Perda.
3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai dalam mendukung kegiatan operasional penegakkan Perda khususnya penertiban PKL. Banyak kegiatan terhalang dan terlambat karena perlengkapan baik dalam di kantor maupun di lapangan. Hal tersebut juga terpengaruh anggaran yang terbatas.
4. Kondisi Pasar Laguboti yang belum dievaluasi kembali oleh Pemda dan Dinas terkait. Banyak keluhan para pedagang terhadap kondisi Pasar yang

membuat PKL lebh memilih beraktivitas di bahu jalan daripada lokasi Pasar yang disediakan.

5. Budaya masyarakat di Kecamatan Laguboti, pola pikir dan kebiasaan masyarakat pedagang menjadi hal penghambat kinerja Satpol PP Toba.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Mengatasi Hambatan

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Toba dalam meringankan faktor penghambat tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Learning by doing dalam mengatasi kendala kompetensi SDM. Bentuk pengarahan dan pelatihan intensif yang dilakukan pimpinan kepada anggotanya.
2. Efisiensi anggaran dalam mengatasi kendala kurangnya anggaran. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penegakan Perda khususnya penertiban PKL di Pasar Laguboti dilakukan dengan efisiensi anggaran yang ada. Efisiensi anggaran yang dilakukan di suatu bidang akan menutupi kebutuhan dana di bidang lain yang mengalami kekurangan dana.
3. Bentuk kerjasama yang sering dilakukan, dengan melibatkan OPD atau Dinas yang lebih terkait untuk melengkapi setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satpol PP.
4. Harapan Satpol PP dengan adanya peninjauan kembali Pasar Laguboti, dengan memperhatikan kembali hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat pedagang.

IV. Kesimpulan

Kinerja Satpol PP Kabupaten Toba dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Laguboti dapat ditarik kesimpulan:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam menegakkan peraturan daerah khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Laguboti sudah cukup baik. Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar Laguboti dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yang serta bentuk koordinasi dengan instansi pemerintah terkait terjalin baik, walaupun hasil yang diharapkan masyarakat belum optimal 100 %.

2. Terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Satpol PP yang membuat beberapa aktivitas dan kegiatan operasi penertiban yang lambat dan bahkan terhambat dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu dari pihak Satpol PP maupun faktor dari luar Satpol PP. Faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan tersebut dimulai dari kompetensi Sumber Daya Manusia yang tidak memadai, sarana dan prasarana tidak lengkap serta anggaran Satpol PP Kabupaten Toba sangat terbatas. Saat ini PKL kembali lagi berada di bahu jalan dipengaruhi oleh kondisi Pasar Laguboti yang sampai saat ini belum ada peninjauan kembali.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mengatasi penghambat kinerja dalam penegakan Perda khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima dengan meningkatkan kompetensi SDM, melakukan efisiensi anggaran, dan kerjasama dengan Dinas lain serta pengadaan beberapa kali untuk melengkapi sarana dan prasarana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Toba khususnya Bapak Josib Brostito Sianipar selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bapak Harianto H. Butar-Butar, SE, M.Si selaku Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Toba yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima serta masyarakat Laguboti yang telah bersedia menjadi informan bagi peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr. Farida Nugrahani, M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Mangkunegara, A. P. (2005). *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana. (2016). *Kepamongprajaan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. bogor: Ghalia Indonesia.

Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarmanto. (2015). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembang R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia(Cetakan ke tujuh)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyudianto, H. (2018). *Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura*. Jakarta: Indocamp.

wibowo. (2016). *Manajemen kinerja*. jakarta: Rajawali press.

Widjajanti, R. (2000). *penataan fisik kegiatan pedagang kaki lima pada kawasan komersial dipusat (study kasus : simpang lima semarang)*. semarang: ITB.

B. REFERENSI JURNAL

Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif, (December), 14. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_da

lam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf

Laksono, R. T. R. I., Administrasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Poitik, I., & Maret, U. S. (2012). Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. 140. Retrieved from https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/24913

Nurmala Hayati. (2020). Peranan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan, 59. Retrieved from http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12925

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

D. LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir 2020

Eka, 'Penertiban Pedagang Di Terminal Porsea', *Info Publik*, 2019 <https://infopublik.id/kategori/nusantara/389334/pemkab-tertibkan-pedagang-di-terminal-porsea#>di akses 28 Agustus 2021

Hotman, 'Tim Gabungan Toba Tertibkan PKL Laguboti', *Metro24jam.Com*, 2019 <https://news.metro24jam.com/read/2019/09/02/77226/lagi-tim-gabungan-pemkab-tobasa-tertibkan-pkl-pasar-laguboti> di akses 28 Agustus 2021

TumburTumanggor, Pemkab Tobasa Tertibkan Ruko di Jalinsum Pasar Laguboti,Medanbisnisdaily.com,https://medanbisnisdaily.com/news pasar_laguboti/ di akses 01 September 2021